

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada penelitian sebelumnya, yaitu sebagai bahan tinjauan untuk melengkapi terhadap teori-teori yang ada.

1. Amirul Khoirudin (2013)

Penelitian Amirul meneliti tentang pengaruh pengungkapan *Good Corporate Governance* terhadap Islamic Social Reporting. Motivasi penelitian tersebut dikarenakan penelitian sebelumnya masih banyak penggunaan *GRI Indeks* dalam pengukuran pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di Perbankan Syariah Indonesia. Dalam penelitian tersebut Good Corporate Governance di proksikan dengan variabel ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah. Sedangkan indeks ISR yang digunakan oleh penelitian tersebut mengacu pada indeks ISR yang digunakan dalam penelitian Rizkiningsih (2012) yang merupakan hasil adaptasi dari indeks ISR yang dibuat oleh Othman et.al (2009) dengan beberapa penyesuaian. Populasi dari penelitian tersebut adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia. Total sampel yang diuji sebanyak 10 bank umum syariah yang dipilih dengan metode purposive sampling. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Islamic social

reporting pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic social reporting pada perbankan syariah di Indonesia.

Persamaan dalam penelitian saat ini terletak pada aspek yang diteliti yaitu *Good Corporate Governance* dan *Islamic Social Reporting*. Perbedaan penelitian saat ini dengan sebelumnya terletak pada elemen *Good Corporate Governance* di penelitian sebelumnya hanya menggunakan elemen ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah, sedangkan di penelitian saat ini *Good Corporate Governance* menggunakan elemen ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan ukuran dewan pengawas syariah,. Perbedaan kedua terletak pada indeks ISR yang digunakan, pada penelitian saat ini menggunakan *indeks Islamic Social Reporting (ISR)* yang mengacu pada penelitian Fitria dan Hartianti (2010) dan penelitian Hafiez Sofyan (2012) dengan komponen indeks ISR terdiri dari 43 item dalam 6 kategori yaitu Investasi dan Keuangan, Tata Kelola Organisasi, Produk Jasa, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan.

2. Hafiez Sofyani, Ihyaul Ulum, Daniel Syam, Sri Wahjuni L (2012)

Tujuan dari penelitian yang dilakukan Hafiez adalah untuk membandingkan kinerja sosial perbankan Islam di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan model *Islamic Social Reporting Index (ISR Index)*. Objek penelitian tersebut adalah tiga bank Islam baik di Indonesia dan Malaysia. Content analysis digunakan untuk menganalisis data. Hasil yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah memberi kontribusi kepada praktek bisnis perbankan Islam yang

terkait dengan tanggung jawab sosial yang mereka jalankan, dan berkontribusi pada input pengetahuan baik sebagai bahan komparasi dan replikasi untuk melakukan studi lebih lanjut terkait dengan Model Indeks ISR dalam menilai kinerja sosial perbankan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja sosial train-average perbankan Islam di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia. Kinerja sosial perbankan Islam di Indonesia pada 2010 mengalami peningkatan yang signifikan, sekitar 10% dari tahun sebelumnya (2009). Sementara kinerja sosial pada perbankan Islam di Malaysia adalah stabil karena tidak meningkat ataupun menurun. Namun, dari semua bank-bank Islam, baik Indonesia dan Malaysia, tidak ada satupun yang mencapai tingkat kinerja sangat bagus.

Indeks ISR yang digunakan dalam penelitian tersebut menjadi acuan dari pengukuran ISR dalam penelitian saat ini. Karena indeks ISR dalam penelitian tersebut sudah cukup mewakili aspek aspek syari'at islam.

3. Rizki Anggita Sari (2012)

Penelitian yang dilakukan Rizki Anggita Sari bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *Corporate Social Disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian tersebut karakteristik perusahaan di proksikan dengan menggunakan variabel tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan pertumbuhan perusahaan. Sedangkan variabel dependen *Corporate Social Responsibility Disclosure* diukur dengan menggunakan indikator dari *Global Reporting Initiative* (GRI) dengan jumlah 79 pengungkapan yang meliputi: *economic* (EC), *environment* (EN),

human rights (HR), labor practices (LP), product responsibility (PR), dan society (SO). Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian tersebut sebanyak 48 sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan (*financial report*) perusahaan manufaktur yang telah dipublikasikan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya *variabel profile, size dan profitabilitas* yang berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Secara simultan variabel *profile, size, profitabilitas, leverage dan growth* berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada penggunaan alat ukur untuk mengukur variabel *profitabilitas* yaitu dengan menggunakan *Return on Assets (ROA)*. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada penggunaan indeks yang digunakan untuk mengukur CSR, di penelitian sebelumnya menggunakan *Global Reporting Initiative (GRI) indeks* dengan jumlah 79 pengungkapan, sedangkan penelitian ini menggunakan *indeks Islamic Social Reporting (ISR)* yang mengacu pada penelitian Fitria dan Hartianti (2010) dan penelitian Hafiez Sofyan (2012) dengan komponen indeks ISR terdiri dari 43 item dalam 6 kategori yaitu Investasi dan Keuangan, Tata Kelola Organisasi, Produk Jasa, Tenaga Kerja, Sosial dan Lingkungan.

4. Soraya Fitria dan Dwi Hartanti (2010)

Penelitian yang dilakukan oleh Soraya Fitria dan Dwi Hartanti bertujuan untuk membandingkan tentang intensitas pengungkapan *Corporate Social*

Responsibility dengan menggunakan *Global Reporting Initiative Indeks* dan *Islamic Social Reporting Index*. Penelitian ini menggunakan sampel yang berasal dari tiga bank umum syariah dan tiga bank konvensional dengan periode satu tahun yaitu tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator-indikator ISR telah cukup mewakili indikator-indikator GRI tahun 2006 namun indikator-indikator GRI tahun 2006 memiliki rincian yang lebih detail dan *komprehensif* dibandingkan indikator-indikator *indeks* ISR sehingga pengungkapan yang dihasilkan pun sangat terbatas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan *indeks* ISR di Indonesia masih sangat lambat dibandingkan perkembangan ISR di negara-negara Islam lain dimana indeks ISR telah menjadi bagian pelaporan organisasi syariah, jadi dapat disimpulkan di Indonesia masih banyak organisasi sosial yang bersyari'at Islam masih menggunakan GRI *indeks* dalam pelaporan CSR tersebut.

Persamaan penelitian saat ini adalah penggunaan ISR indeks dalam pengungkapan CSR, dan ISR indeks yang digunakan saat ini merupakan ISR indeks yang digunakan dalam penelitian Soraya Fitria dan Dwi Hartanti. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak membandingkan pengungkapan CSR dengan berbagai indeks yang ada, tetapi ingin mengetahui tentang pengaruh *Good Corporate Governance* dan *profitabilitas* terhadap *pengungkapan CSR* dengan *Islamic Social Reporting indeks*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Soraya Fitria dan Dwi Hartianti	Studi komparasi membandingkan <i>Global Reporting Initiative Indeks</i> dengan <i>Islamic Social Reporting Index</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator-indikator ISR telah cukup mewakili indikator-indikator GRI tahun 2006 namun indikator-indikator GRI tahun 2006 memiliki rincian yang lebih detail dan komprehensif dibandingkan indikator-indikator indeks ISR sehingga pengungkapan yang dihasilkan pun sangat terbatas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan indeks ISR di Indonesia masih sangat lambat dibandingkan perkembangan ISR di negara-negara Islam lain dimana indeks ISR telah menjadi bagian pelaporan organisasi syariah, jadi dapat disimpulkan di Indonesia masih banyak organisasi sosial yang bersyari'at Islam masih menggunakan GRI indeks dalam pelaporan CSR tersebut.
2	Rizki Anggita Sari (2012)	X1 : Tipe industri X2 : Ukuran perusahaan X3 : Profitabilitas X4 : Leverage X5 : Pertumbuhan perusahaan Y : <i>Corporate Social Responsibility</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel <i>profile, size</i> dan <i>profitabilitas</i> yang berpengaruh signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> . Secara simultan variabel <i>profile, size, profitabilitas, leverage</i> dan <i>growth</i> berpengaruh terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> .
3	Hafiez Sofyani, Ihyaul Ulum, Daniel Syam, Sri Wahjuni L (2012)	Studi komparasi penggunaan ISR dalam pengukuran kinerja sosial Perbankan Syariah antara Indonesia dan Malaysia	. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja sosial <i>train-average</i> perbankan Islam di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia. Kinerja sosial perbankan Islam di Indonesia pada 2010 mengalami peningkatan yang signifikan, sekitar 10% dari tahun sebelumnya (2009). Sementara kinerja sosial pada

No.	Nama Peneliti	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
			perbankan Islam di Malaysia adalah stabil karena tidak meningkat ataupun menurun. Namun, dari semua bank-bank Islam, baik Indonesia dan Malaysia, tidak ada satupun yang mencapai tingkat kinerja sangat bagus
4	Amirul Khoirudin (2013)	X1 :Ukuran Dewan Komsaris X2 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah Y : Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Islamic social reporting pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic social reporting pada perbankan syariah di Indonesia.

2.2 Landasan Teori

Sebelum mengenal variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini, perlu dijelaskan tentang semua komponen yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah, *Good Corporate Governance* dan *Islamic Social Reporting*.

2.2.1 *Legitimasi Theory*

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Nor Hadi. 2011:87). Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian,

legitimas merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*) (O'Donovan, dalam Nor Hadi. 2011:87).

Gray *et.al* (1996) dalam Nor Hadi (2011:88) berpendapat bahwa legitimasi merupakan “.....a system-oriented view of organization and societypermits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the state, individuals and group”. Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu system yang mengedepankan keberpihakan kepada *society*, operasi perusahaan harus *kongruen* dengan harapan masyarakat.

Teori tersebut digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan mengaitkan sebuah laporan *Corporate Social Responsibility* dengan persepsi masyarakat tentang nilai dari perusahaan tersebut. Masyarakat akan menilai apakah perusahaan selain dalam mencapai laba yang diinginkan perusahaan peduli juga terhadap lingkungan di sekitar. Dengan adanya *Islamic Social Reporting* ini diharapkan dapat meyakinkan masyarakat akan kepedulian perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar sesuai dengan syari'at Islam.

Teori legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara struktur *good corporate governance*, dalam hal ini adalah ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah dengan pengungkapan

CSR perbankan syariah. ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah diharapkan dapat mendorong manajemen, selaku pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR agar regulasi dari BI terpenuhi serta menjalankan fungsi bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

2.2.2 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dan Wiroso (2009 : 42) menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank syariah dalam kegiatan operasionalnya membagi kegiatannya menjadi tiga yaitu sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan penyedia jasa-jasa pelayanan. Dana-dana hasil dari penghimpunan dari masyarakat nantinya juga akan disalurkan kepada masyarakat, penyaluran dana tersebut dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Kautsar (2012 : 76) penyaluran dana pada Bank Umum Syariah dilakukan melalui pembiayaan dengan tiga pola penyaluran pembiayaan yaitu prinsip jual beli dalam bentuk murabahah, salam, istishna',

prinsip bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, prinsip sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Bank syariah dapat memperoleh pendapatan dalam prinsip jual beli, bank syariah akan menerima keuntungan dari margin dari transaksi jual beli tersebut. Prinsip bagi hasil akan menerima keuntungan bagi hasil atas usaha yang telah dijalankan, serta prinsip ijarah akan memperoleh upah atas sewa tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk lainnya sesuai dengan prinsip dasar syariah.

2.2.3 Good Corporate Governance

Secara sederhana *goodcorporate governance* dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholders. *Corporate governance* merupakan tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M-PM.PBUMN/2000 tentang pengembangan praktek GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), menjelaskan bahwa GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Malaysian *High Level Finance Committee On Good Corporate Governance* dalam jurnal ekonomi & bisnis (2008), mendefinisikan *good*

corporate governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain.

Peter dan John (2005) mendefinisikan *corporate governance* sebagai "...a set of provisions that enable the stockholders by exercising voting power to compel those in operating control of the firm to respect their interests.", Yaitu seperangkat peraturan yang memungkinkan para pemegang saham memperoleh dukungan yang mendorong agar pengendalian operasional perusahaan dapat sejalan dan menghormati kepentingan pemegang saham. *Cadbury Committee* dalam Budiharta & Gusnadi (2008), mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Prinsip-prinsip GCG merupakan titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam mengembangkan *framework* bagi penerapan GCG. Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*), prinsip-prinsip dasar GCG terdiri dari :

1. Kewajaran (Fairness)

Prinsip kewajaran diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas & pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan dengan membuat peraturan korporasi. Dengan konsep korporasi, maka terdapat pemisahan antara pemegang saham atau pemilik & manajemen yang bertindak sebagai pengelola perusahaan (dalam *Agency Theory*, pihak pertama disebut *Principal*, sedangkan pihak kedua disebut *Agent*). Untuk dapat terlaksananya prinsip ini diperlukan ketersediaan peraturan yang melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas dan asing, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) atau kebijakan yang melindungi korporasi dari perlakuan buruk pihak dalam, menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite, termasuk sistem *remunerasi*, menyajikan informasi secara wajar.

2. Transparansi (*Transparency*)

Keputusan Menteri Negara BUMN tahun 2002 mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan tentang perusahaan. Dalam prinsip ini, *stakeholder* harus diberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atas perubahan dalam perusahaan & memperoleh informasi yang benar, dan tepat waktu,

sehingga tidak ada pihak berkepentingan yang membuat keputusan yang salah. Prinsip ini diwujudkan dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standard akuntansi dan *best practices* yang menjamin pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan *Information Technology (IT)* dan *Management Information System (MIS)* untuk menjamin pengukuran kinerja, mengembangkan *Enterprise risk Management* untuk memastikan bahwa risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dikelola pada tingkat toleransi yang jelas.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini diwujudkan dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu dan cara yang tepat, mendorong seluruh organ perusahaan untuk menyadari tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban mereka masing-masing, mengembangkan Komite Audit dan Risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.

4. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip tanggung jawab menekankan pada sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada shareholder dan stakeholder, yang dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* dapat direalisasikan, yaitu

mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab adalah wujud logis dari wewenang, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelolaan perusahaan atau pihak manajemen, sedangkan pembentukan komite antara lain dimaksudkan untuk membantu kelancaran tugas pengawasan oleh komisaris. Pelaksanaan fungsi pengendalian seperti audit intern, kepatuhan dan manajemen resiko antara lain dimaksudkan untuk membantu tugas pengendalian oleh direksi.

Pada pasal 46 PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Pada konsep tersebut Dewan Pengawas Syariah berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pengawas Syariah melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama sekali mengesahkan dan mengawasi produk-produk perbankan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota DPS dapat merangkap jabatan di empat lembaga keuangan syariah. Ini menjadikan ketentuan mengenai dewan pengawas syariah (DPS) di bank menjadi lebih fleksibel. Sebelumnya berdasar PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, anggota DPS ditetapkan merangkap jabatan di dua bank syariah dan dua lembaga keuangan bukan bank. Namun dengan ketentuan baru anggota DPS dapat menjabat di lembaga keuangan lainnya, tak hanya terpatok pada dua bank.

PBI No 11/03 anggota DPS harus mendapat persetujuan dari BI sebelum resmi menjadi anggota DPS suatu lembaga keuangan syariah. Tak hanya berbekal dari rekomendasi Majelis Ulama Indonesia saja. Selain itu syarat lainnya adalah memiliki integritas, komitmen terhadap pengembangan bank dan lulus dalam uji fit and proper test yang ditetapkan oleh BI. Hal ini didasarkan kepada pentingnya anggota DPS yang profesional dan produktif, (bukan sekedar pajangan), maka, adalah sangat tepat apabila Bank Indonesia melakukan fit and proper test terhadap calon anggota DPS, betapa pun tingkat profesornya dan kedalaman ilmu agama yang dimilikinya. Seorang DPS juga harus cerdas dalam ilmu ekonomi perbankan dan meyakini secara ilmiah tentang keharaman bunga bank.

Berdasarkan Penjelasan diatas disimpulkan bahwa elemen *Good Corporate Governance* yaitu, Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah.

2.2.4 *Corporate Social Responsibility*

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan *corporate socialresponsibility*: “*Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of tje local community and society atlarge*” (Nor Hadi, 2011: 47). Definisi tersebut menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

William G. Nickels, James M. Mchugh, Susan M. Mc Hugh (2009: 128-138) mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial Korporat (*Corporate Social Responsibility-CSR*) sebagai perhatian yang dimiliki bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab ini didasarkan pada perhatian perusahaan bagi kesejahteraan semua pemangku kepentingannya, tidak hanya pemiliknya. Mungkin akan lebih mudah untuk memahami tanggung jawab sosial jika melihat pada konsep tersebut melalui mata para pemangku kepentingan terhadap mana bisnis tersebut bertanggung jawab:

1. Tanggung jawab terhadap pelanggan. Satu tanggung jawab bisnis adalah untuk memuaskan pelanggan dengan menawarkan barang dan jasa yang bernilai nyata.

2. Tanggung jawab terhadap investor.
3. Tanggung jawab terhadap karyawan. Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan jika mereka ingin tumbuh. Jika sebuah perusahaan memperlakukan karyawannya dengan rasa hormat, mereka biasanya juga akan menghormati perusahaan. Satu cara sebuah perusahaan dapat menampilkan komitmen dan perhatian adalah dengan memberi gaji dan tunjangan yang membantu mereka menjangkau tujuan-tujuan pribadi mereka.
4. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat dan Lingkungan. Satu tanggung jawab utama dari bisnis terhadap masyarakat adalah untuk menciptakan kemakmuran baru. Bisnis juga sebagian bertanggung jawab untuk meningkatkan keadilan sosial.

Menurut Nor Hadi (2011: 56-58), satu terobosan besar perkembangan tema tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dikemukakan oleh John Elkington (1997) yang terkenal dengan "*The Triple Bottom Line*" yang dimuat dalam buku "*Canibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Konsep tersebut mengakui bahwa jika perusahaan ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan cuma *profit* yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Konsep Triple Bottom Line tersebut merupakan kelanjutan dari konsep sustainable development yang secara eksplisit telah mengaitkan antara dimensi tujuan dan tanggung jawab, baik kepada shareholder maupun stakeholder. Konsep triple

bottom line nampaknya cukup direspon oleh banyak kalangan karena mengandung strategi integral dengan memadukan antara *social motive* dan *economic motive*.

Profit, merupakan satu bentuk tanggungjawab yang harus dicapai perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis operasional perusahaan, profit merupakan orientasi utama perusahaan. *People*, merupakan lingkungan masyarakat (community) di mana perusahaan berada. Mereka adalah para pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Dengan demikian, community memiliki interrelasi kuat dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan. Hampir tidak mungkin, perusahaan mampu menjalankan operasi secara *survive* tanpa di dukung masyarakat sekitar. Disitulah letak terpenting dari kemauan dan kemampuan perusahaan mendekati diri dengan masyarakat lewat strategi social responsibility. *Planet*, merupakan lingkungan fisik (sumber daya fisik) perusahaan. Lingkungan fisik memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan. Hubungan perusahaan dengan alam yang bersifat sebab akibat. Kerusakan lingkungan, eksploitasi tanpa batas keseimbangan, cepat atau lambat akan menghancurkan perusahaan dan masyarakat.

2.2.4 Islamic Social Reporting

Islamic Social Reporting Index (Index ISR) merupakan salah satu bentuk dari kerangka pelaporan tanggung jawab sosial yang dianggap memperhatikan sisi spiritual (Haniffa 2002). ISR merupakan salah satu bentuk perluasan dari kerangka pelaporan konvensional yang tidak hanya berisi aspek-aspek material, moral dan sosial saja namun juga memperhatikan jenis produk dan jasa yang

ditawarkan oleh perusahaan. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah Islam, misalnya bebas dari riba, spekulatif, samar-samar, dan transaksi haram lain. Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam ISR namun tidak terdapat dalam kerangka pelaporan konvensional adalah adanya zakat, shodaqoh, wakaf, dan bentuk lainnya yang secara teratur digolongkan berdasarkan masing-masing cara perolehan dan penyalurannya.

2.2.5 Perkembangan *Islamic Social Reporting*

Seiring dengan semakin meningkatnya pelaksanaan CSR di dalam konteks Islam, maka semakin meningkat juga keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah (*Islamic Social Reporting* atau ISR). Di dalam perspektif Islam ada dua hal yang harus diungkapkan yaitu pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*).

Konsep akuntabilitas sosial saling berkaitan dengan pengungkapan penuh yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan public akan adanya suatu informasi. Dalam konteks Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala bentuk informasi yang ada di dalam suatu organisasi. Hal tersebut dilakukan agar dapat melihat apakah suatu perusahaan tetap menjalankan sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Baydoun dan Willet, 1997).

Ketiadaan standar CSR secara syariah menyebabkan pelaporan CSR perusahaan syariah menjadi tidak seragam dan standar. Standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) tidak dapat dijadikan sebagai standar pengungkapan CSR karena

tidak menyebutkan secara keseluruhan item-item mengenai CSR yang harus diungkapkan oleh suatu perusahaan.

Othman, ThanidanGhani (2009) telah melakukan penelitian mengenai praktek pelaporan CSR di perusahaan syariah yang *listed* dibursa Malaysia, dan hasilnya memperlihatkan bahwa kebanyakan masih pada tahap konseptual. Hal ini dikarenakan belum adanya standar yang bisa diadopsi perusahaan dalam penerapan CSR syariah tersebut. Penelitian mengenai CSR syariah pada umumnya menggunakan model *Islamic Social Reporting* yang dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti sebelumnya. Secara khusus indeks ISR merupakan perluasan dari *social reporting* dimana masyarakat berharap suatu perusahaan tidak hanya berperan dalam masalah perekonomian, namun juga berperan dalam perspektif spiritual (haniffa, 2002). Indeks ISR juga lebih menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.

2.2.6 Profitabilitas

Menurut Sofyan (2013:304) rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Didalam perbankan syariah *Non Performing Finance* digunakan manajemen untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat

dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki suatu Bank (Teguh Pudji Mulyono, 1995).

Ali (2004) menyatakan bahwa apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar atau mengecil maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan atau kenaikan besarnya keuntungan yang diperoleh bank, sehingga dapat mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan *Return on Assets (ROA)*. Sedangkan Menurut Sofyan (2013 : 305) *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang menggambarkan perputaran asset yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini maka akan semakin baik, karena asset dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. Sehingga di dalam penelitian ini menggunakan *Return on Assets* dalam mengukur profitabilitas di Bank Umum Syariah di Indonesia. *Return On Asset (ROA)* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.2.7 Hubungan *Good Corporate Governance* terhadap *Islamic Social Reporting*

Islamic Social Reporting memiliki hubungan yang erat dengan *Good Corporate Governance*. Dua aspek ini memiliki kedudukan yang kuat dalam dunia bisnis dan berhubungan satu sama lain (Murwaningsari 2009). *ISR* berorientasi kepada para stakeholders, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama *good corporate governance* yaitu responsibility, sedangkan pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan prinsip transparansi

dan akuntabilitas. Berikut penjelasan hubungan setiap elemen *Good Corporate Governance* terhadap *Islamic Social Reporting* yaitu :

1. Ukuran Dewan Komisaris dan Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelolaan perusahaan atau pihak manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002). Menurut dalam penelitian Sulastini (2007) mengatakan bahwa dengan peranan dewan komisaris sebagai pemantau, perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terjaga kelangsungan hidupnya, dengan demikian dikaitkan dengan informasi sosial perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris maka komposisi keahlian dan pengalaman yang dimiliki dewan komisaris akan semakin meningkat sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik (Akhtarudin et.al. dalam Waryanto, 2009). Dengan monitoring yang lebih baik maka diharapkan pengungkapan informasi CSR dapat lebih luas karena meminimalkan kemungkinan informasi yang dimanipulasi.

2. Komposisi Dewan Komisaris Independen dan Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Komisaris independen juga dianggap sebagai alat untuk memantau perilaku dewan direksi (manajemen), sehingga mengakibatkan lebih banyak pengungkapan sukarela tentang informasi perusahaan (Huafang dan Jianguo, 2007; Rosenstein dan Wyatt, 1990 ; Said, et al., 2009; Nurkhin, 2009; Khan, 2010). Dalam penelitian Titan (2012) mengatakan bahwa Komposisi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, ini dikarenakan kurangnya independensi dari dewan komisaris tersebut dan beliau berpendapat bahwa komisaris independen hanya symbol agar memenuhi regulasi yang ada.

3. Ukuran Komite Audit dan Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

FCGI (2001) menjelaskan bahwa agar dapat menjalankan fungsinya di tengah lingkungan bisnis yang kompleks dengan baik, dewan komisaris perlu membentuk komite-komite yang membantunya menjalankan tugas, salah satunya adalah komite audit. SE-03/PM/2000 mewajibkan semua perusahaan publik untuk memiliki komite audit. Kep-29/PM/2004 menjelaskan bahwa tugas komite audit adalah memberi pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Penelitian Titan (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit mempengaruhi kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS, dimana di dalamnya termasuk pengungkapan sukarela, yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial.

4. Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

DPS memegang peranan penting dalam proses pengawasan di bank syariah. DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan. Semakin banyak jumlah DPS dapat meningkatkan level pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai syariat Islam sehingga karakteristik DPS dapat mempengaruhi pengungkapan CSR bank syariah. Penelitian Farook dan Lanis (2005) menemukan bahwa *Islamic Governance* (sebagai proksi *corporate governance* di bank Islam) terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam variabel *Islamic Governance* tersebut dibahas mengenai jumlah dewan pengawas syariah, dimana semakin banyak jumlah DPS dapat meningkatkan level pengungkapan.

2.2.8 Hubungan Profitabilitas terhadap Islamic Social Reporting

Profitabilitas adalah naiknya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama entitas dan dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu tahun periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dan pemilik (Harahap 2007:247). Dengan definisi diatas dapat diungkapkan bahwa seberapa efektifkah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total asset atau ekuitas yang dimilikinya.

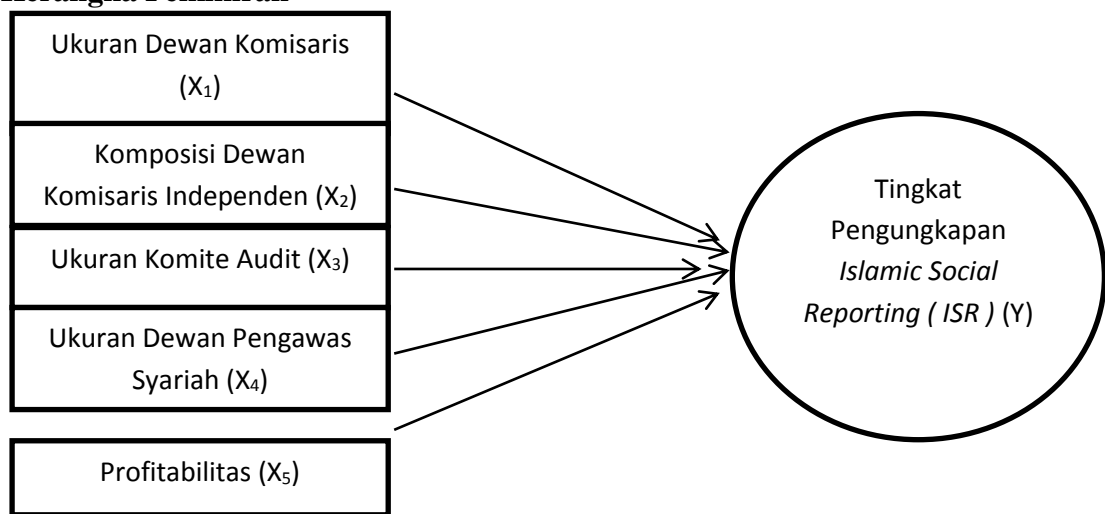
Perusahaan yang berada pada posisi menguntungkan tersebut cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Karena itu, penelitian ini menduga bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan melakukan ISR secara lebih luas. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Anggita Sari (2012) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin perusahaan berada di posisi yang menguntungkan maka perusahaan cenderung melaporkan pengungkapan sosial secara menyeluruh.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan landasan teori dan tinjauan hasil penelitian diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₁: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah.

H₂: Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah.

H₃: Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah.

H₄: Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah.

H₅: Profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah.